LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara Implemantasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal

Hari/Tanggal : Selasa, 15 April 2025

Tempat : Kantor BPKAD Kabupaten Tegal

Narasumber : 1. Bapak Dwi Saputra Zakaria, S.Ak.

2. Ibu Ari Risnawanti, SE., M.M.

3. Ibu Tuti Setyaningsih, S.Ak.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Melalui apa informasi program disampaikan oleh pihak-pihak yang berwenang (Pemerintah) terkkait program SIPD ini?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Dasar kebijakan SIPD berasal dari Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sosialisasi dari pusat masih terlalu umum, kami kesulitan saat menghadapi fitur teknis yang tidak dijelaskan secara detail."* Narasumber kedua menambahkan, *"Materi tidak menyentuh persoalan di lapangan, jadi kami sering belajar sendiri atau tanya ke teman."* Sementara narasumber ketiga berpendapat, *"Sosialisasi awal cukup membantu sebagai pengenalan, tapi tetap perlu pendampingan teknis lanjutan."*

b. Kejelasan

Bagaimana informasi mengenai program SIPD disampaikan secara jelas oleh pihak berwenang kepada pihak-pihak terkait ? dan apakah program SIPD ini mudah dipahami?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Sosialisasi memang sudah dilakukan, tapi kami masih bingung saat menggunakan beberapa fitur di aplikasi. Penjelasan teknisnya kurang mendalam."* Narasumber kedua menambahkan, *"Manual book memang ada, tapi tidak semua pertanyaan kami bisa dijawab dari situ. Kami masih butuh bimbingan langsung."* Sementara narasumber ketiga mengungkapkan, *"Beberapa bagian dari kebijakan SIPD masih belum saya pahami sepenuhnya, terutama saat harus menginput data tertentu. Harusnya ada pelatihan lanjutan yang lebih praktis."*

c. Konsistensi

Informasi program SIPD disampaikan secara konsisten oleh pihak yang berwenang, bagaimana konsistesi informasi tersebut ditunjukkan dalam penyampainnya kepada pelaksana ?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Implementasi SIPD sudah cukup konsisten, terutama dalam hal input data dan pertanggungjawaban keuangan, sesuai Permendagri No. 70 Tahun 2019."* Narasumber kedua menambahkan, *"Arahan dari Kemendagri disampaikan*

terus melalui sosialisasi dan bimtek, tapi masih ada beberapa staf yang belum paham sepenuhnya." Sementara narasumber ketiga menjelaskan, *"Koordinasi dan evaluasi rutin memang sudah ada, tapi kami tetap butuh pendampingan supaya pelaksanaannya di lapangan bisa lebih merata dan konsisten."*

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia (Staf)

Apakah kompetensi tenaga pendamping atau pelaksana program SIPD sudah memadai atau bisa melaksanakannya dengan baik?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Kalau soal SDM, memang masih banyak yang belum benar-benar paham cara kerja aplikasi SIPD, jadi butuh waktu untuk belajar."* Narasumber kedua menjelaskan, *"Kami biasanya saling bantu antar operator SIPD, tukar pengalaman agar yang belum paham bisa ikut belajar."* Sementara narasumber ketiga menambahkan, *"Bimtek dan pendampingan memang sudah dilakukan, tapi masih perlu ditingkatkan karena masih ada staf yang kesulitan menjalankan aplikasi."*

b. Informasi

Bagaimana BPKAD Kabupaten Tegal menerapkan informasi prosedural dan kepatuhan dalam penggunaan SIPD?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Kami berpegang pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sebagai acuan utama dalam*

pelaksanaan SIPD, termasuk dalam prosedur dan alur kerjanya." Narasumber kedua menambahkan*, "Selain aturan teknis, kami juga memperhatikan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, supaya semua proses berjalan sesuai ketentuan."* Sementara narasumber ketiga menjelaskan, *"Tujuan akhirnya tentu untuk membangun tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel lewat sistem elektronik, dan kami terus berusaha ke arah sana."*

c. Wewenang

Bagaimana pembagian wewenang dalam pelaksanaan SIPD di BPKAD Kabupaten Tegal mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Pembagian tugas sudah jelas. Tiap bidang punya satu sampai tiga orang yang fokus menangani SIPD, jadi pekerjaan lebih terarah."* Narasumber kedua menjelaskan, *"Kami yang tidak langsung input ke sistem bertugas menyiapkan dan mengusulkan data. Koordinasinya jadi lebih mudah karena sudah terbagi."* Sementara narasumber ketiga menambahkan, *"Semua pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi. Ini bukti bahwa kami siap mendukung suksesnya kebijakan publik lewat SIPD."*

d. Fasilitas

Apakah sarana dan prasarana di BPKAD Kabupaten Tegal seperti komputer, jaringan internet, dan akses ke server SIPD sudah memadai untuk menjalankan tugas?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Secara umum, fasilitas dan teknologi di kantor sudah cukup mendukung, tapi akses ke server SIPD sering lambat, apalagi saat jam sibuk."* Narasumber kedua menambahkan, *"Beberapa fitur di aplikasi SIPD masih kurang sesuai dengan kebutuhan pelaporan kami. Kadang harus mencari cara manual.* Sementara narasumber ketiga mengatakan, *"Agar lebih efektif, memang perlu perbaikan infrastruktur dan pengembangan fitur yang lebih relevan dengan kebutuhan daerah."*

3. Disposisi

a. Pengangkatan Birokrasi

Bagaimana Bapak menilai dukungan pelaksana di BPKAD Kabupaten Tegal terhadap penerapan aplikasi SIPD? Apakah struktur tanggung jawab sudah berjalan sebagaimana mestinya?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Dukungan dari semua elemen di BPKAD terhadap SIPD sangat baik. Kami semua berkomitmen menjalankan petunjuk teknis yang ada."* Narasumber kedua menjelaskan, *"Setiap pegawai sudah punya tugas masing-masing, baik di perencanaan, pengelolaan, maupun pelaporan keuangan. Jadi tidak tumpang tindih."* Sementara narasumber ketiga menambahkan, *"Struktur birokrasi sudah cukup terorganisir. Koordinasi juga lancar, jadi implementasi SIPD bisa berjalan dengan baik sejauh ini."*

b. Insentif

Apakah ada bentuk penghargaan atau insentif yang diberikan kepada pegawai yang berhasil mengimplementasikan SIPD dengan baik?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Sampai sekarang belum ada insentif khusus untuk operator SIPD, padahal tanggung jawabnya cukup besar."* Narasumber kedua menambahkan, *"Kami mengelola data keuangan dan menyusun pelaporan, tapi belum pernah menerima penghargaan tambahan, baik berupa uang maupun bentuk lain."* Sementara narasumber ketiga mengatakan*, "Kalau ada insentif, tentu akan menambah semangat kerja, apalagi tugas kami cukup berat dan teknis."*

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Apakah sudah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait pelaksanaan SIPD?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Saat ini belum ada SOP khusus di daerah yang mengatur penggunaan SIPD secara rinci. Semuanya masih mengikuti aturan dari pusat."* Narasumber kedua menjelaskan*, "SIPD kan program nasional, jadi SOP-nya memang sudah ditentukan lewat regulasi seperti Permendagri dan peraturan pemerintah."* Sementara narasumber ketiga menambahkan, *"Karena sudah diatur pusat, kami di daerah belum buat SOP sendiri. Jadi pelaksanaannya menyesuaikan dengan aturan yang ada."*

b. Fragmentasi Organisasi

Apakah pembagian tugas dalam implementasi SIPD di instansi Anda sudah dilakukan dengan jelas sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang?

Catatan/Tanggapan : Narasumber pertama menyampaikan, *"Pembagian tugas sudah sesuai struktur organisasi, mulai dari Kepala Dinas, Kabid, hingga staf penginput data. Semua punya peran masing-masing."* Narasumber kedua menjelaskan, *"Dengan pembagian seperti ini, beban kerja jadi lebih fokus dan kesalahan input bisa diminimalkan."* Sementara narasumber ketiga menambahkan, *"Struktur ini membantu mempercepat pelaporan dan mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah."*

Lampiran 2. Buku Bimbingan Tugas Akhir

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING I

Nama : Revalin Dwi Al Musa
NIM : 22030095
Program Studi : D III Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi kebijakan sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Tegal
Pembimbing I : Ririh sri Harjanti. SE. MM

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1	Rabu, 26/2 2025	ACC judul TA	
2.	Senin, 17/3 2025	Konsultasi Proposal	
3.	Kamis, 20/3 2025	konsultasi proposal	
4.	Rabu 9/4 2025	Acc proposal TA	
5.	jumat 23/5 2025	Bimbingan Tugas Akhir	
6	selasa, 10/6 2025	Bimbingan Tugas Akhir	
7.	Senin, 23/6/25	Bimbingan Tugas Akhir	
8.	Selasa, 24/6/25	ACC TA	

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

DOSEN PEMBIMBING II

Nama : Revalin Dwi Al Musa
NIM : 22030095
Program Studi : D III Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kab. Tegal
Pembimbing II : Arifia Yasmin, SE, M.si, AK

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I/II
1.	Rabu, 26/2/25	ACC judul TA	
2.	kamis, 20/3/25	Bimbingan Proposal TA	
3.	senin, 24/3/25	ACC proposal TA	
4.	Jumat, 22/5/25	Revisi Bab 4-5	
5.	Rabu, 11/6/25	Bimbingan TA 1	
6.	Kamis, 26/6/25	Bimbingan TA 2	
7.	Rabu, 2/7/25	Bimbingan TA 3	
8.	kamis, 3/7/25	ACC TA	